



**SUMBER BERITA**

<b>X</b>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

## 12 Lembaga “Kecipratan” Dana Hibah, Ini Rinciannya

**SELUMA** – Sebanyak 12 lembaga mulai dari instansi vertikal dan badan, lembaga serta organisasi kemasyarakatan kecipratan dana hibah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma.

12 lembaga di lingkungan Pemkab Seluma yang kecipratan dana hibah ini jelas sudah berbadan hukum.

Anggaran dana hibah kepada 12 lembaga ini berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2024, yang disalurkan Pemkab Seluma melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Seluma.

Hal ini dibenarkan oleh Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Seluma, Dadang Kosasih, MT.

Menurut Dadang, pemberian dana hibah ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma Nomor 200-268 tahun 2024.

SK itu berisi tentang penetapan penerima belanja hibah kepada Instansi vertikal dan badan, lembaga serta organisasi kemasyarakatan di lingkungan Pemkab Seluma Tahun Anggaran 2024.

Ja merinci, nama lembaga serta besaran dan hibah yang diterima. Untuk KPU Seluma sebesar Rp 15,6 Miliar.

Bawaslu Seluma sebesar Rp 5,4 Miliar, Pos TNI Angkatan Laut Rp100 Juta, Polres Seluma Rp 5,5 Miliar, Kodim 0425/Seluma Rp 1,3 Miliar.

Kemudian, Forum Kerukunan Umat Beragama sebesar Rp 50 Juta, Gerakan Pramuka Kwarcab 0705 Seluma Rp 200 Juta, Badan Amil Zakat Nasional Rp 50 Juta, Pemuda Pancasila Rp 50 Juta.

Selanjutnya, Pemuda Muhammadiyah sebesar Rp 25 Juta, Persatuan Wartawan Indonesia Rp 250 Juta dan Gerakan Pemuda Anzor Rp 50 Juta.

“Untuk KPU dan Bawaslu kembali dianggarkan pada APBD 2024 ini untuk membayarkan sisa 60 persen kesepakatan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemkab dan KPU Bawaslu yang telah dibuat tahun lalu,” terang Dadang.

Dadang menambahkan, Kesbangpol Seluma siap untuk memproses pencairan sisa dana hibah untuk dua lembaga penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pilkada) Seluma 2024 mendatang.

Yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) Seluma dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Seluma.

Namun dengan catatan, kedua lembaga tersebut haruslah melaporkan realisasi dari anggaran

### Dana Hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seluma kepada 12 Lembaga, dalam APBD 2024:

1. KPU Seluma Rp15,6 Miliar.
2. Bawaslu Seluma Rp5,4 Miliar
3. Pos TNI Angkatan Laut Rp100 Juta
4. Polres Seluma Rp5,5 Miliar
5. Kodim 0425/Seluma Rp1,3 Miliar.
6. Forum Kerukunan Umat Beragama Rp 50 Juta
7. Gerakan Pramuka Kwarcab 0705 Seluma Rp200 Juta
8. Badan Amil Zakat Nasional Rp50 Juta
9. Pemuda Pancasila Rp50 Juta.
10. Pemuda Muhammadiyah Rp25 Juta,
11. Persatuan Wartawan Indonesia Rp250 Juta
12. Gerakan Pemuda Anzor Rp 50 Juta.

Sumber: Surat Keputusan (SK) Bupati Seluma Nomor 200-268 tahun 2024.

yang sebelumnya sudah disalurkan ke melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Perubahan 2023 lalu.

Karena itu sesuai dengan amanat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu ke Kesbangpol Seluma.

“Jadi bisa diajukan kembali jika keduanya telah menyampaikan realisasi penggunaan anggaran yang sebelumnya telah disalurkan,” ujar Dadang.

Selain itu untuk sisa dana hibah yang dianggarkan di APBD murni 2024, Dadang mengatakan Kesbangpol berkoordinasi dengan Badan Keuangan Daerah (BKD) Seluma terkait anggarannya.

Sehingga nantinya Kesbangpol dapat mengetahui kapan informasi anggarannya sudah tersedia.

“Jika administrasinya sudah clear (selesai, red) dan anggarannya sudah tersedia, akan kita transfer langsung ke rekening KPU dan Bawaslu Seluma,” jelas Dadang.

Untuk diketahui, Penandatanganan NPHD telah dilakukan Pemkab Seluma bersama Bawaslu dan KPU Kabupaten Seluma pada Selasa 14 November 2023 lalu.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati Seluma tersebut, dihadiri oleh Bupati Seluma, Erwin Octavian, SE, Sekretaris Daerah (Sekda) Seluma, DPRD Seluma, KPU Seluma dan Bawaslu Seluma.

Besaran dana hibah daerah yang dikucurkan Pemkab Seluma untuk sukseskan Pilkada 2024 mendatang, totalnya mencapai Rp35 miliar, terdiri Rp26 miliar untuk KPU dan Rp9 miliar untuk Bawaslu.

Akan tetapi sesuai Permendagri No. 15 Tahun 2019 tentang kegiatan pendanaan Pilkada, dana hibah tersebut tidak sekaligus dikucurkan.

Namun baru 40 persennya dialokasikan dana hibah yang disiapkan Pemkab Seluma di 2023 dan 60 persennya di 2024.

Seharusnya, pada tahun 2023, KPU dikucurkan Rp10,4 miliar dan untuk sisanya di tahun 2024 dikucurkan Rp15,6 miliar.

Sedangkan untuk Bawaslu baru dikucurkan Rp3,6 miliar dan sisanya di tahun 2024 dikucurkan Rp5,4 miliar.

Namun, pada APBD Perubahan 2023 lalu, Pemkab Seluma hanya mampu menyalurkan Rp5,5 miliar untuk hibah pilkada bagi dua lembaga penyelenggara Pilkada.

Rinciannya yakni KPU Seluma disalurkan Rp5 miliar dan Bawaslu Seluma Rp500 juta.

Angka tersebut nilainya di bawah NPHD antara Pemkab dan KPU Bawaslu lantaran kondisi keuangan daerah yang terbatas.

Namun Dadang memastikan seluruh sisa dana hibah yang belum terbayarkan akan disalurkan pada tahun ini menggunakan APBD murni 2024.

“Baik sisa 2023 maupun kewajiban yang memang harus disalurkan di APBD 2024 akan include semua dibayarkan di tahun ini,” tegas Dadang.

Untuk diketahui, terkait jadwal tahapan Pilkada sesuai lampiran peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota 2024.

Jadwal dari pendaftaran pasangan calon dimulai sejak 27 Agustus 2024 hingga 29 Agustus 2024 mendatang.

Lalu dilanjutkan penelitian persyaratan pasangan calon sejak 27 Agustus 2024 hingga 21 September 2024 dan dilanjutkan dengan penetapan pasangan calon pada 22 September 2024.

Kemudian masa kampanye pasangan calon akan berlangsung pada 25 September 2024 hingga 23 November 2024.

Dan pelaksanaan pemungutan suara berlangsung pada 27 November 2024 yang langsung dilanjutkan dengan penghitungan dan rekapitulasi surat suara hingga 16 Desember 2024.

Pilkada serentak tahun ini akan diselenggarakan di 514 Kabupaten/Kota dan 38 Provinsi di Indonesia. (zzz)